



KOMUNIKASI DAN ADVOKASI

KEBIJAKAN PUBLIK

Nova Riyanti, S.Sos., M.A.P



KOMUNIKASI DAN ADVOKASI

KEBIJAKAN PUBLIK

Nova Riyanti, S.Sos., M.A.P



KOMUNIKASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

Penulis:

Nova Riyanti, S.Sos., M.A.P

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-766-0

Cetakan Pertama:

Oktober, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah Wasyukurillah, Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memampukan saya menyelesaikan buku ajar mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan publik bagi mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, meskipun tidak menutup kemungkinan buku ini mungkin juga berguna untuk proyek lain, studi lain seperti komunikasi dan bahkan referensi administrasi publik, serta disiplin ilmu lain seperti manajemen publik, kebijakan publik, ilmu pemerintahan, sosiologi, dan program penelitian sosial politik lainnya.

Buku ajar ini ditulis dengan mengacu pada Rencana Studi Semester (RPS) yang disepakati oleh tim dosen pendukung Program Komunikasi dan Advokasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Buku ajar ini juga merupakan hasil kegiatan pembelajaran dan inovasi Program Kompetisi Kampus Merdeka Tahun 2023.

Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ajar ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap agar semua pihak dapat memberikan kritik dan koreksi kepada saya agar buku ajar ini dapat diperbaiki dan disempurnakan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu proses penyelesaian buku ajar ini, termasuk direktur proyek penelitian dan rekan-rekan saya di FISIPOL UMPR. Buku ajar ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi pelajar, namun juga bagi para praktisi, politisi, pemerintah, pengamat sosial, dan masyarakat awam yang memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kebijakan publik.

Palangka Raya, Oktober 2023

Nova Riyanti, S.Sos., M.A.P.

IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik
Kode Mata Kuliah/SKS : 176PP01145 / 3 SKS
Semester : V (Lima)
Status Mata Kuliah : Pilihan Program Studi (Konsertasi Kebijakan Publik)

Mata kuliah ini mengajarkan keterampilan melakukan advokasi kebijakan publik, menganalisis isu-isu kebijakan dan membuat perubahan serta solusi untuk permasalahan kebijakan secara sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dan teknik-teknik advokasi kebijakan publik. Secara khusus mata kuliah ini dirancang untuk memudahkan para pembaca agar mereka dapat memahami pentingnya melakukan advokasi sebagai sarana mewujudkan perubahan kebijakan dalam pembangunan yang diharapkan masyarakat. Pemahaman terhadap advokasi kebijakan yang strategis, diawali dengan pemahaman tentang konteks ruang lingkup kebijakan publik, proses dan unsur komunikasi kebijakan, peran komunikator dalam kebijakan, segala bentuk dan teknik komunikasi efektif. Diperdalam dengan pemahaman advokasi, dan prinsip advokasi agar para pembaca mampu menilai kekuatan dan kelemahan organisasi untuk melakukan advokasi; mengetahui berbagai pendekatan dalam mengorganisir dan membangun advokasi; mampu mengidentifikasi isu kebijakan dan menganalisis strategi yang tepat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam berbagai lingkungan. *Dan pada bagian akhir mampu menyajikan analisis dan membuat Case Study Advokasi Kebijakan dengan sajian policy brief.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IDENTITAS MATA KULIAH	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK	1
A. Kebijakan Publik	1
B. Isu-Isu Dalam Kebijakan Publik	4
C. Aktor Dalam Kebijakan Publik	4
BAB 2 PROSES DAN UNSUR KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK	9
A. Komunikasi	9
B. Unsur-Unsur Komunikasi	10
C. Tujuan Utama Komunikasi	13
D. Komunikasi Kebijakan	14
E. Proses Komunikasi Dalam Kebijakan	16
F. Prinsip Komunikasi Kebijakan	17
BAB 3 PERAN KOMUNIKATOR DALAM KOMUNIKASI KEBIJAKAN	19
A. Komunikasi Persuasif	19
B. Retorika Komunikator	21
C. Kredibilitas Komunikator	22
D. Model-Model Komunikasi	23
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi	25
BAB 4 LEVEL KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK	27
A. Komunikasi Intra Personal	27
B. Komunikasi Inter Personal	28
C. Komunikasi Kelompok	29
D. Komunikasi Massa	29
BAB 5 TEKNIK-TEKNIK KOMUNIKASI	31
BAB 6 ADVOKASI KEBIJAKAN	33
A. Advokasi	33
B. Model-Model Advokasi	35
C. Proses dan Strategi Advokasi	36
D. Unsur-Unsur Advokasi	37
E. Jenis-Jenis Advokasi	37
BAB 7 PRINSIP POKOK ADVOKASI	41
A. Tujuan Advokasi	41
B. Prinsip-Prinsip Advokasi	42
C. Langkah Advokasi Kebijakan	45

D. Indikator Advokasi Kebijakan	45
E. Teknik Advokasi Kebijakan	46
BAB 8 ADVOKASI TERPADU DAN IDENTIFIKASI ISU KEBIJAKAN	47
A. Tujuan	47
B. Data	48
C. Sasaran	48
D. Pesan	48
E. Koalisi.....	48
F. Dana.....	49
G. Pelaksanaan.....	49
H. Pertemuan.....	49
BAB 9 CASE STUDY ADVOKASI KEBIJAKAN DAN POLICY BRIEF	51
A. Pengertian <i>Policy Brief</i>	52
B. Urgensi <i>Policy Brief</i>	54
C. Kelebihan <i>Policy Brief</i>	55
D. Sistematika Penulisan <i>Policy Brief</i>	56
LAMPIRAN CONTOH POLICY BRIEF	58
DAFTAR PUSTAKA.....	66
BIODATA PENULIS.....	68



RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan selalu menjadi sebuah pembahasan yang selalu dipertanyakan, baik itu kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh lembaga dan organisasi sektor publik (Nur & Guntur, 2019). Masyarakat kerap berdiskusi atau mengkritisi berbagai permasalahan kebijakan, seperti kebijakan zonasi yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, sistem distribusi beras murah yang belum mencapai tujuannya, serta permasalahan yang ada tanpa disadari juga merupakan dampak dari kebijakan. Pembahasan mengenai kebijakan selalu aktif di masyarakat, bahkan terus menjadi sorotan, dan diskusi-diskusi tersebut muncul dalam rangka pengambilan kebijakan yang baik dan benar. Mengingat hal tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dan konsep kebijakan dan masyarakat itu sendiri. Dengan cara ini, perspektif yang berbeda dalam menjelaskan implikasi kebijakan dapat memunculkan paradigma baru.

A. KEBIJAKAN PUBLIK

1. Definisi Kebijakan

Kebijakan yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan istilah *Policy*. *Policy* dalam kamus *Black Law Dictionary* karya Henry Campbell Black (Suaib et al., 2022) bermakna:



PROSES DAN UNSUR KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK

A. KOMUNIKASI

Secara etimologis, kata "*communication*" berasal dari bahasa Inggris *communications*. Biasanya kata "komunikasi" didefinisikan dan disebut "komunikasi" seperti itu, dan orang dapat mendeskripsikannya, meskipun tidak semuanya benar.

Dikatakan bahwa kata berkomunikasi berasal dari bahasa latin *communicatio* dan berasal dari kata *communis* yang berarti "genap". Arti kata "sama" adalah sama. Ada pula yang menyebut komunikasi dari akar kata bahwa komunikasi berarti berbagi. Tegasnya dapat dibuktikan bahwa peristiwa komunikasi antara satu orang dengan orang lain terjadi dengan menggunakan bahasa yang sama dan menyepakati makna yang "sama", meskipun keduanya mungkin berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. (Yusuf & Fahrudin, 2023).

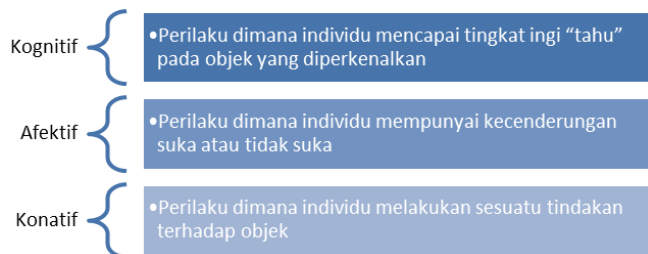
Definisi komunikasi telah banyak dikemukakan oleh para pakar. Tidak ada satu definisi yang tunggal dan benar. Para pakar memberikan definisi berdasarkan pemahaman dan sudut pandang masing-masing bidang ilmunya. Misalnya Harlod D. Laswell (Laswell, 1948) pakar ilmu politik memberikan definisi singkat bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan "siapa yang menyampaikan apa, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya".



PERAN KOMUNIKATOR DALAM KOMUNIKASI KEBIJAKAN

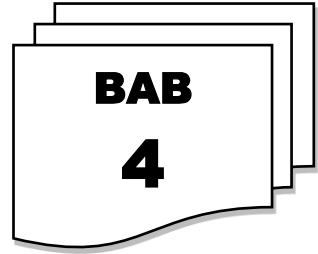
A. KOMUNIKASI PERSUASIF

Komunikasi Persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Pada umumnya sikap-sikap individu/kelompok yang hendak dipengaruhi ini terdiri dari tiga komponen, yaitu:



Ilustrasi Kognitif:

Pertanyaan: Apa yang ingin diketahui dalam ilustrasi berikut ini?



LEVEL KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK

A. KOMUNIKASI INTRA PERSONAL

Bentuk komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu, atau dengan kata lain proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Terjadinya proses disini karena adanya seseorang yang memberi arti terhadap suatu objek yang diamatinya atau terbesit dalam pikirannya. Objek dalam hal ini bisa saja dalam bentuk benda, kejadian alam, peristiwa, pengalaman, fakta yang mengandung arti bagi manusia, baik yang terjadi di luar maupun di dalam diri seseorang (Cangara, 2007:30).

Mampu berdialog dengan diri sendiri berarti mampu mengenal diri sendiri. Dengan berkomunikasi dengan diri sendiri sehingga dapat berfungsi secara bebas di masyarakat. Belajar mengenal diri sendiri berarti belajar bagaimana kita berfikir dan merasa dan bagaimana kita mengamati, menginterpretasikan dan mereaksi lingkungan kita. Sebab itu untuk mengenal diri pribadi, kita harus memahami komunikasi intrapribadi.

Melalui komunikasi intrapribadi kita berbicara dengan diri sendiri, mengenal diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri tentang ini dan itu, mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan diambil dan menyiapkan pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain.



TEKNIK-TEKNIK KOMUNIKASI

H. A. W. Widjaja (2002: 67) yang mengatakan bahwa Komunikasi persuasi ini tidak lain daripada suatu usaha untuk meyakinkan orang lain agar publiknya berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator dengan membujuk tanpa memaksanya/tanpa kekerasan.

✚ Kampanye

Menurut Rogers dan Storey, bahwa kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu.

✚ Publisitas

Merupakan kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang produk/jasa atau hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan/organisasi. Publisitas dapat menghasilkan image. Publisitas biasanya dilakukan melalui hubungan dengan pers (media).

✚ Lobby

Lobi merupakan upaya meyakinkan kepada pihak lain agar mau mengakomodir kepentingan kita sehingga muncul solusi dan terbinanya hubungan baik antara kedua belah pihak.

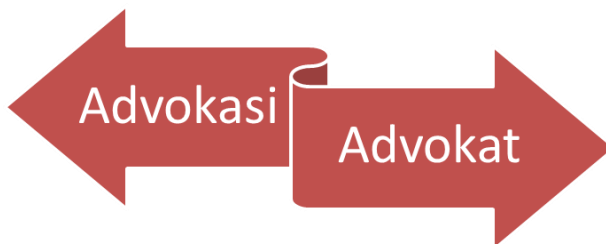
✚ Komunikasi Perintah

Teknik komunikasi instruktif adalah penyampaian pesan komunikasi dikemas sedemikian rupa sehingga pesan itu dipahami sebagai perintah yang harus dilaksanakan.



ADVOKASI KEBIJAKAN

A. ADVOKASI



Ada pemahaman bahwa advokasi sering dikait-kaitkan dengan lembaga bantuan hukum yang mana di dalamnya melibatkan advokat. Ada pula dengan para ahli hukum yang berwenang yang berguna untuk melakukan advokasi. Definisi advokasi berasal Bahasa Belanda yaitu *advocaat* atau *advocateur* yang berarti pengacara atau pembela, oleh karenanya istilah advokasi ini sangat lekat sekali dengan profesi hukum. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata advokasi mempunyai definisi sebagai *to advocate*, yang mempunyai definisi tidak hanya membela (*to defend*), melainkan juga dapat berarti mengemukakan atau memajukan (*to promote*), menciptakan (*to create*) dan melakukan perubahan (*to change*).



PRINSIP POKOK ADVOKASI

A. TUJUAN ADVOKASI

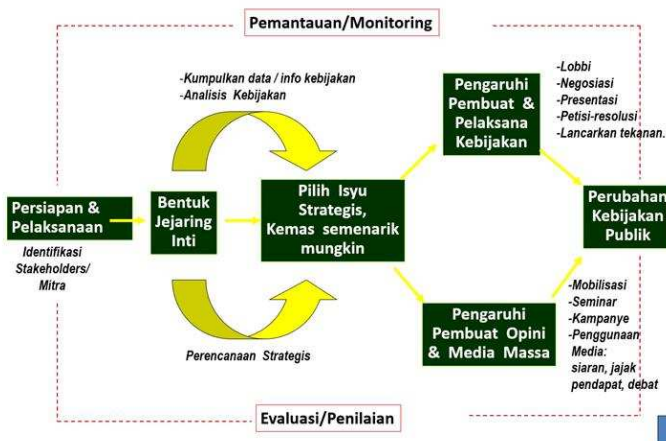
Tujuan advokasi sebenarnya melakukan perubahan, dengan demikian akan selalu muncul resistensi, oposisi dan atau konflik, tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi. Beberapa prinsip dapat dijadikan pedoman dalam merancang advokasi yang sukses. Agar tujuan advokasi berhasil, tujuan umum harus dipersempit sampai pada tujuan Advokasi yang didasarkan jawaban terhadap pertanyaan:

- Dapatkah masalah ini mengajak berbagai kelompok bersama-sama membentuk koalisi yang kuat?
- Apakah tujuan mungkin tercapai?
- Apakah tujuan benar-benar menangani masalah?

Tujuan dari advokasi kebijakan publik adalah untuk mendapatkan komitmen pembelaan dan pendampingan untuk menjamin hak-hak konstitusional seseorang atau masyarakat secara demokratis dan adil. Lebih Lanjut, dalam kegiatan pemerintahan hak konstitusional seseorang masyarakat dapat berbentuk relasi kekuasaan antar aktor institusional berupa munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Wahyudi (2008: 27) menyebutkan lima tujuan advokasi kebijakan:

BAB 8

ADVOKASI TERPADU DAN IDENTIFIKASI ISU KEBIJAKAN



A. TUJUAN

Memilih Tujuan Advokasi

Agar tujuan advokasi berhasil, tujuan umum harus dipersempit sampai pada tujuan Advokasi yang didasarkan jawaban terhadap pertanyaan:

- Dapatkah masalah ini mengajak berbagai kelompok bersama-sama membentuk koalisi yang kuat?
- Apakah tujuan mungkin tercapai?
- Apakah tujuan benar-benar menangani masalah?



CASE STUDY ADVOKASI KEBIJAKAN DAN *POLICY BRIEF*

Case study advokasi kebijakan bisa dilihat dari dua sisi. Ada *best practice* and *bad practice*. Sehingga kasus kebijakan tidak hanya fokus ke sisi negatif saja, walaupun dalam hakikat riset kebijakan memiliki tujuan yang memiliki ciri untuk menjawab atas segala permasalahan publik.

Dalam hal menelaah kasus kebijakan publik, maka kegiatan kebijakan publik perlu adanya model penelitian yang relevan dalam membuat kebijakan publik. adapun model riset kebijakan publik bisa melalui:

1. Studi Kasus merupakan sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi perilaku para individu maupun kelompok melalui rekaman dan informasi berdasarkan individu atau kelompok sekitar untuk memperoleh data yang akurat.
2. Eksperimen lapangan merupakan upaya penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti mengenai dampak implementasi perubahan kebijakan dan mengontrol serta mengevaluasi perubahan kebijakan setelah diimplementasikan.
3. Analisis biaya manfaat merupakan sebuah kegiatan penelitian yang mengaitkan metode yang digunakan oleh peneliti dalam membandingkan biaya dan manfaat untuk masyarakat dalam memilih alternatif kebijakan. Analisis ini berguna untuk menganalisis masalah sosial, ekonomi, lingkungan, dan isu- isu kebijakan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, H. (2012). *Pengantar ilmu komunikasi*.
- DeVito, J. A. (2019). *The interpersonal communication book. Instructor*, 1, 18.
- Dwiyanto, A. (2012). *Riset Kebijakan dan Cara Presentasi, Bahan Paparan*.
- Engkus, E. (2020). Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Non tunai melalui E-Warong. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 23(1).
- Fischer, F., Miller, G. J., & Baihaqi, I. (2021a). *Kebijakan Publik Perbandingan: Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Nusamedia.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Baihaqi, I. (2021b). *Panduan Kerangka Koalisi Advokasi: Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Nusamedia.
- Guamguami, M., & Zerious, M. (2018). On communication and cross-/inter-cultural communication: Going beyond cultural categorization. *Culture, Society and Education: An Interdisciplinary Reader*, 14–42.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah*.
- Kronsell, A., Khan, J., & Hildingsson, R. (2019). *Actor relations in climate policymaking: Governing decarbonisation in a corporatist green state. Environmental Policy and Governance*, 29(6), 399–408.
- Kustini, H. (2017). *Communication Skill*. Deepublish.
- Laswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. *The Communication of Ideas*.
- Lembaga Administrasi Negara RI. (2017). *Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan*.
- Lunenburg, F. C. (2010). Communication: The process, barriers, and improving effectiveness. *Schooling*, 1(1), 1–10.
- Mahardhani, A. J. (2018). *Advokasi Kebijakan Publik*. Calina Media.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)* (1st ed., Vol. 11). Leutikaprio.

- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher UNM*.
- Paramansyah, H. A., & SE, S. H. (2022). *MANAJEMEN STRATEGIS: Strategi, Konsep, & Proses Organisasi*. Almuqsith Pustaka.
- Rahardian, R. (2020). Memahami Advokasi Kebijakan: Konsep, Teori, dan Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik (Pertama). *Yogyakarta: Deepublish Publisher*.
- Rustan, A. S., & Hakki, N. (2017). *Pengantar ilmu komunikasi*. Deepublish.
- Saleh, A. M. (2016). *Komunikasi dalam kepemimpinan organisasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Supriyono, B. (2020). Isu-isu kebijakan publik kontemporer. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 83–89.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Taufiqurokhman, D. R., Sos, S., & Si, M. (2014). Kebijakan Publik. *Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)*.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.
- Yusuf, M. A., & Fahrudin, M. (2023). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. IAIN SALATIGA.
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(2).

BIODATA PENULIS

Nova Riyanti, S.Sos., M.A.P lahir di Sampit, 28 November 1995 sekarang sebagai Dosen Tetap Yayasan yang berhomebase di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Penulis mengampu mata kuliah Kebijakan Publik, Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik, Reformasi Administrasi, Dan Manajemen Sumber Daya Sektor Publik. Gelar sarjana administrasi negara dan magister administrasi publik diperoleh dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saat ini penulis sedang mempersiapkan melanjutkan program Doktorat.

Sejak menjadi mahasiswa, penulis aktif menulis dan melakukan penelitian yang rutin setiap tahun yang telah terpublikasi di media nasional, jurnal nasional, jurnal internasional dan aktif dalam konferensi internasional. Serta mengikuti berbagai peningkatan kapasitas diri melalui berbagai pelatihan khususnya konsentrasi kebijakan publik seperti mengikuti Diklat Penyusunan Naskah Akademik dan Diklat Data Analitik untuk Kebijakan Publik.

Buku ini adalah buku ajar pertama yang dituliskan, sehingga saran dan kritik membangun sangat diharapkan dalam proses kesempurnaan buku ini, pembaca dapat menghubungi penulis melalui email novartiyanti@umpr.ac.id



KOMUNIKASI DAN ADVOKASI

KEBIJAKAN PUBLIK

Buku ajar ini ditulis dengan mengacu pada Rencana Studi Semester (RPS) yang disepakati oleh tim dosen pendukung Program Komunikasi dan Advokasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Buku ajar ini juga merupakan hasil kegiatan pembelajaran dan inovasi Program Kompetisi Kampus Merdeka Tahun 2023.

Buku ajar ini cocok bagi para mahasiswa maupun individu atau kelompok masyarakat yang ingin mempelajari dasar-dasar komunikasi dan advokasi di bidang kebijakan publik. Buku ini ditujukan bagi pemula, buku ini merupakan pengantar yang baik karena menggunakan bahasa yang mudah dan berisi pembahasan relevan tentang fenomena yang ada di masyarakat. Bagian terakhir juga mencakup studi kasus mengenai kebijakan kelompok sosial. Struktur buku teks ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Ruang Lingkup Kebijakan Publik
- BAB II Proses dan Unsur-Unsur Komunikasi Kebijakan
- BAB III Peran Komunikator Dalam Komunikasi Kebijakan
- BAB IV Bentuk-Bentuk Komunikasi
- BAB V Teknik-Teknik Komunikasi
- BAB VI Advokasi Kebijakan
- BAB VII Prinsip Pokok Advokasi
- BAB VIII Advokasi Terpadu dan Identifikasi Isu Kebijakan
- BAB IX *Case Study* Advokasi Kebijakan



Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-766-0



9 786234 597660